

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA
MANDIRI DI DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ILHAM RA

E051 191 012



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA
MANDIRI DI DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD ILHAM RA
E051 191 012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

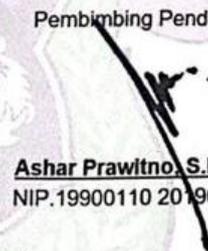
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001



Ashar Prawitno, S.IP, M.Si
NIP.19900110 201904 3 001

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
DESA MANDIRI DI DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**MUHAMMAD ILHAM RA
E051 191 012**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 13 Juli 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, <u>M.Si</u>	()
Sekretaris	: Ashar Prawitno, <u>S.IP, M.Si</u>	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, <u>M.Si</u>	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, <u>S.IP, M.Si</u>	()
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	()

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilham RA

NIM : E051191012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

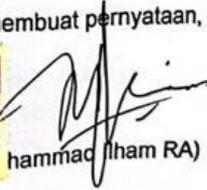
**“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA
MANDIRI DI DESA NISOMBALIA KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS”**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

 
hammad ilham RA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah *rabbil 'alamiin*, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan banyak kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa Mandiri di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.”** Shalawat besertakan salah juga tidak lupa dihaturkan kepada junjungan segala umat, nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan Sebagian persyaratan untuk menyandang gelar sarjana dalam hal ini Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.

Penulisan skripsi ini disadari masih belum sempurna, terdapat kekurangan-kekurangan yang dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan ini tidaklah muda, banyak pengetahuan baru dari hasil pencarian kebenaran karena kesulitan, cobaan dan tantangan-tantangan yang datang sejak awal hingga penyelesaian penulisan, tetapi alhamdulillah penulis tetap pantang menyerah dan tidak berputus asa berkat keteguhan pada keyakinan dan juga dorongan positif dari berbagai pihak. Skripsi

adalah pencapaian yang besar untuk banyak pihak juga menyandang sarjana adalah mimpi banyak orang, maka dari itu penulis sangat bersyukur atas pencapaian ini.

Pada kesempatan yang luar biasa ini, penulis menyampaikan kepada orangtua tercinta sebesar-besarnya terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk ayahanda M. Rabbany Khalik dan Ibunda Syumriati yang telah melahirkan, merawat, dan menjaga hingga tumbuh dengan memberikan lingkungan yang sangat bermakna, pelajaran hidup yang tidak terhingga, kesabaran dan keikhlasan, tumbuh dengan kedewasaan, Pendidikan di keluarga kecil yang sangat berharga untuk hidup penulis, menikmati hidup dengan penuh lika-liku hingga penulis sadar ternyata untuk menjadi manusia seutuhnya, banyak pengalaman yang harus dirasakan. Tumbuh dengan cukup kasih sayang dan nasihat kepada penulis adalah bekal utama dalam menjalani hidup penulis diperantauan, terlebih perhatian penuh yang diberikan adalah energi yang tidak pernah habis yang penulis peroleh. Terima kasih, do'a, nasihat, perhatian dan materi yang diberikan sangat mendukung perjalanan penulis. Semoga sehat dan kehidupan ayahanda dan ibunda diberkati dan selalu dalam perlindungan-Nya.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak penulis. Anas, Fahmi, dan Hijrah sebagai motivasi penulis untuk cepat menyelesaikan studi ini agar kedepan penulis sebagai adik dapat

memberikan yang terbaik untuk kakak-kakak penulis. Juga pada keluarga besar M. Saing Ramang dan Ibu Madayang, terima kasih tak terhingga atas do'a, materi, perhatian yang diberikan menambah energi positif dan kebahagiaan untuk penulis. Semoga keluarga tercinta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wata'ala, *Aamiin*.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrative serta dorongan dan semangat untuk memberikan perhatian lebih pada tugas akhir ini (skripsi).
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan, memberikan waktu luang untuk membimbing penulis, mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi kemudahan pada setiap permasalahan dalam penulisan ini hingga mengantarkan

penulis menyandang gelar sarjana, penulis sangat-sangat berterima kasih semoga kebaikan selalu menyertai dan bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dari penulis hanya bermodalkan judul dan pengetahuan yang sangat minim hingga menjadi paham akan arah penelitian dan hasilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tentu kedepan, akan lebih banyak lagi tantangan dan hal baru yang akan penulis temui, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama penulis menyandang status mahasiswa tetap awet dan dapat dikembangkan sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan yang baru bagi penulis. Terima kasih dan semoga perlindungan dari yang maha kuasa selalu menyertai bapak.

5. Para tim penguji, Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan sehingga pikiran penulis lebih terbuka dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan terkhusus Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si., Bapak Saharuddin, S.IP, M.Si., terima kasih atas banyak ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyandang status sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin.

7. Pak Mursalim, S.IP dan Ibu Hasnawati, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua elemen yang terlibat dalam memberikan informasi dan jawaban atas pertanyaan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yakni informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Bapak Drs. Idrus M.Si., sebagai Kepala Dinas, Ibu Herawati S Sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Desa , Bapak Marhabang sebagai tim Verifikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Sulkarnain sebagai Kepala Desa Nisombalia, Bapak Saparuddin sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa Nisombalia, Bapak Muh. Hatta sebagai penyuluh koperasi Dinas Koperasi dan UMKM,

bapak Harmin sebagai Pendamping Lokal Desa Nisombalia, Bapak Ilham Laiya sebagai Ketua Lembaga Bumi Mentari (LSM) dan masyarakat Kabupaten Maros.

9. Terima kasih untuk teman dan sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas yakni Ruslan, Sukri, Bohari yang juga tidak memutuskan tali silaturahmi dan menjadi kawan penulis sampai sekarang.
10. Terima kasih Untuk Teman-teman PMR SMANSEL, Fajar, Rifaldi, Muti dan Hayatulla, Ica, Diwan sahabat penulis juga dalam menemani selama kepengurusan organisasi PMR sejak SMA. Terima kasih untuk hubungan pertemanan yang tidak pernah putus, saling membantu, menghibur dan banyak bertukar cerita adalah salahsatu kesenangan dan kebahagiaan tersendiri untuk penulis.
11. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan selama berada di bangku kuliah, n “ZEITGEIST 2019” : Edli, Alm. Zaky, Wahyu, Viko, Andes, Ramlan, Eki, hafiqi, Amirul, Adam, Firga, Ibnu, Rafli, Fajri, Andri, Reza, Arsel, Asrul, Umi, Ila, Nunu, Aldian, Puput, Indah, Tisa, Stevy, Venike, Pute, Rizka, Nisa, Okta, Vira, Inna, Lili Ling, Umi Rahayu, Lala, Indah P, Ulfi, Hudiya. Terima kasih untuk kebersamaan dari awal kuliah sampai menyanggah gelar sarjana. Untuk pengalaman, pelajaran hidup, persaudaraan, bantuan dan banyak cerita yang telah

diukir bersama, semoga tetap terjaga dan hubungan persaudaraan diantara kita tidak akan pernah terputus.

12. Terima kasih untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas : Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Kaizen 2017, Eleftheria 2018, Maintiendrai 2020, Dignite 2021. Rumah kedua untuk penulis, yang mengajarkan cara berorganisasi, banyak sekali pengalaman, cerita, ilmu, lingkungan awal yang penulis dapatkan di kampus. Semoga kekeluargaan dan identitas Merdeka Militan selalu melekat untuk setiap kader-kader Himapem.
13. Terima kasih untuk teman-teman kelas SMA penulis ROFEL Smansel 2019, yang juga memberikan semangat untuk penulis.
14. Terima kasih untuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis yang memberikan banyak cerita selama KKN, Desa Wisata Maros Gelombang 108 (Gofal, Khalik, Yasser, Reza, Satria, Fadlan) semoga tali silaturahmi diantara kita tetap terjalin.
15. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Eka Rumalang, S.IP, yang telah setia mendampingi dan tidak pernah berhenti memberi support kepada penulis. Terima kasih karena telah banyak bersabar menghadapi penulis, yang juga memberikan banyak pelajaran,

hal baru yang penulis dapatkan dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran baru yang penulis dapatkan, semoga tetap terjaga sampai pada titik.

Makassar, Maret 2023

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pemerintah Daerah	11
2.1.1 Strategi	11
2.1.2 Indeks Desa Membangun.....	12
2.1.3 Pemerintah Daerah.....	13
2.1.4 Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa Mandiri. 16	
2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Desa Mandiri	22
2.3 Kerangka Konsep.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros	39
4.1.1 Sejarah Kabupaten Maros.....	39

4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Maros.....	43
4.1.3 Keadaan Topografis Kabupaten Maros	45
4.1.4 Kependudukan.....	47
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Maros.....	48
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros	49
4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros	49
4.2.2 Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros 51	
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros	52
4.2.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.4 Hasil Penelitian	60
4.4.1 Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros	60
4.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Nisombalia	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	118
Daftar Pustaka	120
LAMPIRAN–LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun 2022	6
Tabel 2. Dimensi Ketahanan Berdasarkan Indikator Indeks Desa Membangun Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros	7
Tabel 3. Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros	44
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020-2022	47
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Nisombalia tahun 2021-2022	58
Tabel 6. Unit usaha dan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Tani Nelayan Lestari tahun 2021-2026	63
Tabel 7. Dimensi Ketahanan Berdasarkan Indikator Indeks Desa Membangun Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros	67
Tabel 8. Jenis Pekerjaan di Desa Nisombalia	68
Tabel 9. Realisasi Program/Kegiatan Dinas PMD Kab. Maros	73
Tabel 10. Program/Kegiatan Pengembangan BUMDes Kab. Maros ...	76
Tabel 11. Anggaran unit usaha Peternakan Ayam Petelur	78
Tabel 12. Unit usaha dan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Tani Nelayan Lestari tahun 2021-2026	84
Tabel 13. Data Pusat Perdagangan di Desa Nisombalia	89
Tabel 14. Data Ketersediaan kantor pos dan jasa logistik	94
Tabel 15. Data Ketersediaan Lembaga Keuangan	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Maros.....	45
Gambar 2. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros	54
Gambar 3. Peta Administrasi Desa Nisombalia	58
Gambar 4. Struktur Organisasi BUMDes Desa Nisombalia.....	61
Gambar 5. Peta Sebaran Lahan Pertanian dan Perikanan Desa Nisombalia.....	65
Gambar 6. Usaha Ternak Sapi dan Ayam Petelur Desa Nisombalia....	66
Gambar 8. Program Kewirausahaan Peternakan Ayam Petelur	75
Gambar 9. Pantai Kuri Caddi di Desa Nisombalia.....	81
Gambar 10. Jalan menuju Pantai Kuri Caddi di Desa Nisombalia.....	82
Gambar 11. Pasar permanen Pa'bentengang terdekat.....	87
Gambar 12. Warung / toko kelontong terdekat.....	89
Gambar 13. Bank BRI terdekat.....	99
Gambar 14. Pegadaian terdekat.....	99
Gambar 15. Unit Usaha Peternakan BUMDes Mitra Tani Nelayan Lestari.....	100
Gambar 16. Akses Jalan Menuju Dusun Kuri Caddi	105
Gambar 17. Pengerjaan Jalan Baru Menuju Dusun Kuri Caddi	105
Gambar 18. Produk UMKM Ash Shiddiq Desa Nisombalia	108

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM RA, Nomor Induk Mahasiswa E051191012, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa Mandiri di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Dibimbing Oleh Dr. H. A. M Rusli, M.Si., dan Ashar Prawitno, S.IP, M.Si.

Pembangunan desa sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan, dan kesejahteraan secara adil serta sebaik-baiknya kemakmuran desa untuk memperkuat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Nisombalia dan Faktor-faktor apa saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa di Desa Nisombalia. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbentuk naratif untuk memberikan penjelasan dan ungkapan gambaran secara realitas tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Desa Mandiri di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan untuk penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia yaitu Pemerintah lebih berfokus pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan membentuk Empat unit usaha yang dinaungi oleh BUMDes Mitra Tani Nelayan Lestari sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pengembangan usaha ekonomi Desa yang terdiri dari unit usaha Peternakan Ayam Petelur, Perikanan berupa Kepiting Rajungan, Layanan PPOB (Payment Point Online Bank), Pengelolaan Sampah dan untuk Perikanan berupa kepiting Rajungan sementara tidak berjalan karena faktor Pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa, Strategi, Pemerintah.

ABSTRACT

MUHAMMAD ILHAM RA, Student Identification Number E051191012, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a scription with the Title: Regional Government Strategy in Developing an Independent Village in Nisombalia Village, Marusu District, Maros Regency by Dr. H. A. M Rusli, M.Si., and Ashar Prawitno, S.IP, M.Si.

Rural development is very important to be carried out to meet the needs of village people's lives, improve the quality of services, and welfare in a fair and optimal way for village prosperity to strengthen social resilience, economic resilience, and ecological resilience in a sustainable manner.

The purpose of this research is to find out how the implementation of village economic business development in Nisombalia village and what factors influence the implementation of village economic business development in Nisombalia village. The type of research used is a qualitative approach with a narrative research strategy to provide an explanation and expression of a realistic picture of the Local Government's Strategy in Developing Independent Villages in Marusu District, Maros Regency. The collection technique for this study was by means of interviews, observation and documentation as well as data analysis with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the development of Village economic businesses in Nisombalia Village, namely the Government focuses more on developing community economic businesses by establishing four business units that are sheltered by BUMDes Mitra Tani Nelayan Lestari as an effort made by the Government in developing village economic businesses consisting of business units Laying hens, fisheries in the form of crab crabs, PPOB (Payment Point Online Bank) services, waste management and fisheries in the form of crab crabs are temporarily not running due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: Development, Village-Owned Enterprises, Strategy, Government.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk kesatuan, yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dipimpin oleh kepala negara yang disebut dengan Presiden. Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif.

Indonesia memiliki cita-cita pada dasar negara yang mulia, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pasal 2 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

Pemerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggungjawab negara yang kemudian dilimpahkan kepada kepala

daerah di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga tercipta stabilitas kehidupan masyarakat.

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah pengembangan wilayah yang tentunya bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya pengembangan suatu daerah di Indonesia seringkali memunculkan dampak pada terjadinya ketidakseimbangan antar wilayah. Karena suatu wilayah dapat dilihat keberhasilannya dengan disematkannya status daerah maju, sedangkan daerah yang belum berhasil berkembang dikatakan daerah tertinggal.

Seperti pada salah satu wilayah yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Maros dengan Ibukota Turikale memiliki luas wilayah 1.619,12 km² dan jumlah penduduk sebanyak 396,92 jiwa pada tahun 2021. Berhasil mendapatkan status daerah maju berdasarkan indeks desa membangun tahun 2022.

Keberhasilan di tingkatan kabupaten tidak terlepas dari peran pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti salah satu daerah kecamatan Marusu yang berhasil mendapatkan status daerah maju berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2022.

Kecamatan Marusu memiliki luas 73,83 km² dan penduduk berjumlah 33.423 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 452,70 jiwa/km², serta memiliki tujuh desa definitve yang secara keseluruhan terdapat 24 Dusun dan 104 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan Indek Desa Membangun di kecamatan Marusu kabupaten Maros tahun 2022, terdapat 3 desa yang di kategorikan sebagai desa mandiri, 3 desa maju dan 1 desa yang masih berkembang.

Bukan hanya pencapaian status pada tingkat kabupaten dan Kecamatan, tetapi juga dari tingkat desa, sebanyak 80 desa dengan kategori 13 desa mandiri, 41 desa maju, 24 desa berkembang dan 2 desa tertinggal serta terdiri dari 23 kelurahan. Namun pengembangan

daerah Kabupaten Maros tidak berhenti pada status yang telah dicapai. Masih banyak desa-desa yang memerlukan perhatian lebih dan pengembangan untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal usul khusus. Prinsip dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara historis. Jauh sebelum terbentuknya negara ini, desa merupakan pionir dalam pembentukan komunitas politik dan pemerintahan Indonesia. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang sangat penting. Desa merupakan organisasi otonom dengan tradisi, adat, dan hukumnya sendiri yang relatif independen. Hal ini terutama tercermin dalam tingkat keragaman yang tinggi, yang menjadikan desa sebagai bentuk negara yang paling konkret.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan status desa menjadi 5 yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Status desa ditentukan berdasarkan tiga indikator dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ayat 3 pasal 1 Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Ketiga indikator di atas merupakan acuan dalam penetapan status Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Jika dikaitkan dengan indikator indeks komposit di atas, maka salah satu Desa di Kabupaten Maros yaitu Desa Nisombalia dapat dikategorikan sebagai Desa Mandiri yang terdapat di Kecamatan Marusu dengan jumlah penduduk 33.423 jiwa penduduk dengan luas wilayah 73,83 km² dengan indeks pembangunan yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	KODE DESA	NAMA DESA	IDM	STATUS
1	7309082006	ABULOSIBATANG	0.6979	Berkembang
2	7309082005	BONTO MATE'NE	0.7762	Maju
3	7309082004	MA'RUMPA	0.8081	Maju
4	7309082002	NISOMBALIA	0.8549	Mandiri
5	7309082007	PA'BENTENGANG	0.8952	Mandiri
6	7309082003	TELLUMPOCCOE	0.7092	Maju
7	7309082001	TEMMAPADUAE	0.8597	Mandiri

Sumber : Website Kemendesa (<https://idm.kemendesa.go.id>). Tahun 2022

Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa ada 3 desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri di Kecamatan Marusu pada tahun 2022 yaitu Desa Pa'bentengang dengan IDM (0,8952), Desa Temmapaduae (0,8597) dan Desa Nisombalia (0,8549).

Jika dibandingkan dengan 3 Desa Mandiri tersebut, Nilai Indeks Desa Membangun Desa Nisombalia pada tahun 2022 masih terbilang rendah yaitu 0,8549, Desa Nisombalia dikategorikan sebagai desa mandiri, namun hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan parameter IDM (Indek Desa Membangun) Desa Nisombalia masih terbilang rendah pada dimensi ketahanan ekonomi.

Hal ini tergambar dari tabel 2, dimensi ketahanan ekonomi berdasarkan indikator indeks desa membangun Desa Nisombalia sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini;

Tabel 2
Dimensi Ketahanan Ekonomi Berdasarkan Indikator Indeks Desa Membangun Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	DIMENSI KETAHANAN EKONOMI	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Keragaman produksi masyarakat desa	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	2
2.	Tersedia Pusat pelayanan perdagangan	Pertokoan	1 Unit
		Pasar permanen	0 Unit
		Semi permanen	0 Unit
		Warung	30 Unit
		Minimarket	0 Unit
		Kedai Makanan	1 Unit
		Restoran	0 Unit
3.	Akses distribusi/logistic	Kantor pos	0 Unit
		Jasa logistik	0 Unit
4.	Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	Bank umum pemerintah	0 Unit
		Bank swasta	0 Unit
		Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	1 Unit
5.	Keterbukaan wilayah	Kualitas jalan Desa	1 Dusun Rusak
		Moda transportasi umum	2 Unit

Sumber : Kantor Desa Nisombalia (Data Primer Setelah Diolah). Tahun 2022

Pada Tabel 2 di atas, memberikan gambaran bahwa desa nisombalia pada dimensi ketahanan ekonomi yang berdasarkan

indikator indeks desa membangun masih rendah seperti pusat pelayanan perdagangan yaitu belum tersedianya pasar permanen ,semi permanen dan minimarket, belum tersedianya kantor pos dan jasa logistik untuk keperluan sehari-hari, belum tersedia lembaga keuangan seperti bank umum pemerintah dan bank swasta, dan masih buruknya kualitas jalan ke salah satu dusun yang ada di Desa Nisombalia yaitu Dusun Kuri Caddi yang berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat dan aktifitas ekonomi yang tumbuh di wilayah tersebut.

Pembangunan desa sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan, dan kesejahteraan secara adil serta sebaik-baiknya kemakmuran desa untuk memperkuat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bertanggungjawab atas pembangunan desa mandiri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 137 Tahun 2022 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros mempunyai tugas pokok diantaranya melaksanakan pengembangan usaha ekonomi Desa.

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa diperlukannya berbagai macam pembangunan dan upaya guna menyejahterakan kehidupan masyarakat Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI DI KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pembangunan Desa Mandiri.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana Pemerintah Daerah dalam pembangunan Desa mandiri, terkhusus bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pembangunan Desa mandiri.

3. Manfaat Metodologis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah Kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Desa Mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Strategi

Siagian (dalam Akdon, 2009:130) mendefinisikan strategi sebagai “serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan”. Menurut Andrew (2005), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).

Konsep strategi menurut Wheelen dan Hunger (dalam Amir, 2012:7) adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Dengan strategi, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dengan memanfaatkan kekuatan

dan meminimalkan kelemahan dari lingkungan internal. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2005: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap perumusan. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- 2) Tahap pemutusan. Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- 3) Tahap pelaksanaan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- 4) Tahap penilaian. Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya

2.1.2 Indeks Desa Membangun

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun

adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa dan menyediakan data serta informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini yaitu komponen Indeks Desa Membangun, status kemajuan dan kemandirian Desa serta penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016 dengan rincian hasil pendataan sebagai berikut:

STATUS IDM DESA	JUMLAH DESA
MANDIRI	174
MAJU	3,608
BERKEMBANG	22,882
TERTINGGAL	33,592
SANGAT TERTINGGAL	13,453
TOTAL	73,709

Sumber : Website Kemendesa (<https://idm.kemendesa.go.id>).

2.1.3 Pemerintah Daerah

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa

masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5).

Pemerintah adalah bagian alat perlengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat perlengkapan negara, yang terjadi dalam cabang-cabang kekuasaan eksekutif, dan yuridis atau alat-alat perlengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara (bagis manan, 2001:101).

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan.

2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di maksud agar dapat mengeluarkan

kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.1.4 Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Desa Mandiri

Siagian (2005:108) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut American Public Works Association (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik

yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem. Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Dalam teori Wagner, dijelaskan mengenai bagaimana relasi antara infrastruktur sebagai modal pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori ini menjelaskan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengeluaran pemerintah terdapat keterkaitan positif untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata.

Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui strategi pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut :

- Strategi Pertumbuhan. Harus ada indikator yang menentukan akan terjadinya pertumbuhan pada berbagai aspek penting di desa. Misalnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pendapatan, hasil produksi, dan lainnya.
- Kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti pengembangan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik.
- Strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pengembangan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat

sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.

- Strategi Terpadu dan Menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 137 Tahun 2022 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros yaitu :

a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPMD mempunyai tugas pokok Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang bina pemerintahan desa, kelembagaan, penataan desa dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

- 1) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan

serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;

- 2) Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- 3) Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- 4) Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- 6) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Badan;
- 7) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- 9) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok organisasi;
- 10) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 12) Membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pemerintahan Desa;
- 13) Mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- 14) Mengordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Usaha Ekonomi Desa;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Fungsi DPMD

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selain Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa mandiri. Dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) Pemerintah Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Fungsi Pemerintahan Desa (Sedarmayanti, 2003) yaitu :

- Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan; dan
- Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Desa Tertinggal

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Pada pasal 1 angka (11) (12) (13) (14) dan (15) menjelaskan tentang macam-macam desa yaitu:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- d. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa diatas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.

- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Status desa ditentukan berdasarkan tiga indikator dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun ayat 3 pasal 1 Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

- modal sosial;
- kesehatan;
- pendidikan; dan
- permukiman.

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

- keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk;
- tersedia pusat pelayanan perdagangan;
- akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik;
- akses ke lembaga keuangan dan perkreditan;
- lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
- keterbukaan wilayah.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

- kualitas lingkungan; dan
- potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Namun masih sangat banyak desa di Indonesia yang perlu dikembangkan karena berstatus desa tertinggal bahkan sangat tertinggal. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Masyarakat Desa berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 36 ayat 1 masyarakat mempunyai hak yaitu :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - Kepala Desa;
 - Perangkat Desa;
 - Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan tentang Desa di Indonesia, termasuk pengembangan dan bagaimana memajukan suatu desa. Kebijakan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, kebijakan tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Peraturan Menteri Desa serta Peraturan Bupati Maros Nomor 137 Tahun 2022 pasal 4 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.

2.3 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014).

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi Desa di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Kerangka pikir penelitian :

- UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN.
- PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa :

- a. Faktor Pendukung
 - Banyaknya bantuan dari pemerintah daerah
 - Potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata
 - BUMDes
 - Organisasi Masyarakat
- b. Faktor Penghambat
 - Koordinasi antar DPMD dan Pemerintah Desa
 - SDM yang kurang dikembangkan
 - Konflik dendam politik
 - Pengembangan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Pelaksanaan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa :

- Keragaman produksi masyarakat desa,
- Pusat pelayanan perdagangan,
- Akses distribusi/logistik,
- Akses ke lembaga keuangan,
- Keterbukaan wilayah.

Tercapainya Desa Mandiri Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Desa